

Kepastian Hukum Atas Kewajiban Majelis Pengawas Notaris Untuk Menyampaikan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt/2018/Pt.Mdn) = Legal Certainty Of The Obligation Of The Notary Supervisory Board To Submit The Results Of The Examination Of The Community Report (Study of the Medan High Court Decision No. 161 /Pdt/2018/Pt.Mdn)

Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20523021&lokasi=lokal>

Abstrak

Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas Notaris yaitu agar para Notaris mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan laporan masyarakat. Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Laporan masyarakat dan bagaimana Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Kepada Majelis Pengawas Daerah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt/2018/PT.Mdn. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah sesuai dengan bunyi pada Pasal 71 UUDN, sedangkan jika merujuk pada esensi dibentuknya Majelis Pengawas Notaris adalah guna mengawasi kinerja Notaris dan memberikan wadah mengadu bagi para pihak dalam akta yang merasa dirugikan atas kinerja Notaris. Kekosongan hukum atas perilaku majelis pengawas daerah yang tidak melakukan kewajibannya tersebut berpotensi untuk melemahkan kepercayaan masyarakat atas jabatan Notaris dan berdampak pada citra Majelis Pengawas Notaris di Indonesia. Sedangkan peran dan fungsi majelis pengawas Notaris di Indonesia adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang diharapkan mampu mencegah perbuatan sewenang-wenang dari Notaris.

.....Supervision carried out by the Notary supervisory board is so that notaries can carry out their duties and liability in accordance with applicable rules to meet the needs of the general public. In its position as a State Administrative Agency or Department, the Supervisory Board has the authority to make or issue Decrees or Decrees relating to the results of supervision, examination, or enforcement of sanctions addressed to the Relevant Notary based on community reports. The problem of this study is how the obligation of the Regional Supervisory Board to submit the results of the examination of the community report and how to follow up the Community Report to the Regional Supervisory Board in the Medan High Court Decision Number 161 / Pdt / 2018 / PT.Mdn. The form of research used in this research is normative juridical research that specifically examines the law with literature studies. The conclusion of this matter is in accordance with the sound in Article 71 UUDN while referring to the essence of the establishment of the Notary Supervisory Board is to supervise the performance of the Notary and provide a forum to complain about the parties in the deed who feel aggrieved by the performance of the Notary. The legal vacuum over the conduct of the regional supervisory assembly that did not perform its obligations has the potential to

weaken public confidence in the position of Notary and have an impact on the image of the Notary Supervisory Board in Indonesia. While the role and function of the Notary supervisory panel in Indonesia is to conduct coaching and supervision of Notaries who are expected to prevent arbitrary actions from notaries.